



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DIDYK CHOIROEL
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 124159

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.130.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/83 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/73 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.080.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **73.575.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.750.000
2. MOBIL, NISSAN LIVINA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
4. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
5. MOBIL, HONDA-CRV-1.5 TURBO CVT HONDA/MPV Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 325.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	1.966.317.306
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.169.892.306
III. HUTANG	Rp.	545.841.721
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.624.050.585

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.